

Katalog : 4301002.3307

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO**

Katalog : 4301002.3307

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO 2023

<https://wonosobokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO**

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO 2023

Katalog : 4301002.3307
ISBN :
Nomor Publikasi : 33070.24022
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xvi + 70 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo.

TIM PENYUSUN

Statistik Pendidikan Kabupaten Wonosobo 2023

Pengarah : Dr. Mustaqim, S.ST., SE., M.Si.

Penanggung Jawab : Wulandari, S.ST., M.Stat.

Penyunting : Wulandari, S.ST., M.Stat.

Penulis Naskah : Anggit Mustika Rani, S.ST.
Nurharis Mustofa

Pengolah Data : Anggit Mustika Rani, S.ST.

Pembuat Infografis : Anggit Mustika Rani, S.ST.

Pembuat Kover : Galih Setyo Utomo, A.Md

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wonosobo 2023 merupakan salah satu topik penyajian hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo.

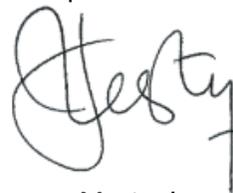
Publikasi ini menyajikan informasi mengenai kondisi dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Data yang disajikan mencakup beberapa aspek kegiatan pendidikan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga publikasi ini dapat disajikan, disampaikan ucapan terima kasih. Saran yang membangun dan masukannya untuk perbaikan publikasi serupa di masa datang sangat diharapkan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Wonosobo, September 2024

Kepala Badan pusat Statistik

Kabupaten Wonosobo



Mustaqim

GAMBARAN UMUM

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa. Seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ..."

Kurangnya pemerataan pendidikan, kurangnya kualitas pendidikan, kurangnya relevansi pendidikan, dan kurangnya efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan merupakan beberapa hal yang bisa menjadi faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Internet yang merupakan salah satu media terbesar di dunia bisa digunakan sebagai pendorong majunya pendidikan masa depan. Namun, ternyata lebih banyak siswa yang sudah mengakses internet dibandingkan dengan yang belum mengakses internet baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Meskipun demikian, persentase siswa yang sudah mengakses internet di daerah perkotaan lebih sedikit daripada daerah perdesaan.

Susenas juga mencatat biaya pendidikan, yaitu keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh penduduk yang masih bersekolah untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. Jenis pengeluaran pendidikan terbesar yang dikeluarkan oleh rumah tangga baik di daerah perkotaan maupun perdesaan berupa uang sekolah (SPP/UKT) dan iuran komite sekolah/POMG.

Tingkat pendidikan suatu masyarakat yang diwakili pendidikan KRT ternyata mempengaruhi partisipasi anak yang mengikuti PAUD. Hal ini ditunjukkan dengan lebih banyaknya anak di daerah perkotaan yang sedang/pernah mengikuti pendidikan pra sekolah dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat adalah dengan adanya program pendidikan gratis pada tingkat dasar. Namun pada kenyataannya, program yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak pernah sekolah.

Secara umum Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di daerah perdesaan. Tidak jauh berbeda dengan nilai APS, persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) di daerah perkotaan ternyata juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada APK di daerah perdesaan, kecuali pada jenjang SD/MI dan SMP/MTS. Kesenjangan APK tersebut semakin besar seiring meningkatnya jenjang pendidikan.

Sama halnya dengan pola yang terjadi pada APS dan APK, kesenjangan APM antara perkotaan dan perdesaan semakin terlihat pada jenjang PT. Sementara pada jenjang pendidikan SD/MI, APM tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan.

Perbedaan nilai APS, APK, dan APM antara daerah perkotaan dan perdesaan ini menggambarkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan di Kabupaten Wonosobo ternyata belum merata. Kesempatan penduduk di daerah perkotaan untuk menikmati pendidikan lebih besar daripada penduduk yang di daerah perdesaan.

Hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat antara lain melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019–2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam melakukan program pemberantasan buta aksara memberikan hasil yang positif.

Seiring dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Wonosobo sudah mencapai 6,84 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Jawa Tengah sudah mengenyam pendidikan sampai dengan Kelas 1 SMP. Hal ini diperkuat dengan banyaknya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas di Wonosobo yang hanya menamatkan pendidikan tertingginya sampai dengan jenjang SD/MI.

<https://wonosobokab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
GAMBARAN UMUM	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Sistematika Penyajian	5
BAB 2 METODOLOGI	7
2.1 Sumber Data	9
2.2 Ruang Lingkup	10
2.3 Kerangka Sampel	10
2.4 Prosedur Penarikan Sampel	10
2.5 Design Sampling	12
2.6 Sampling Weight.....	13
2.7 Estimator.....	14
2.8 Konsep dan Definisi.....	14
2.9 Metode Analisis	18
2.10 Estimasi Sampling Error.....	18
BAB 3 SARANA PENUNJANG PENDIDIKAN	21
3.1 Penggunaan Internet.....	23
3.2 Biaya Pendidikan	25
BAB 4 PARTISIPASI PENDIDIKAN	27
4.1 Pendidikan Anak Usia Dini	30

4.2	Partisipasi Sekolah.....	34
4.3	Angka Partisipasi Sekolah	37
4.4	Angka Partisipasi Kasar	40
4.5	Angka Partisipasi Murni	43
BAB 5 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN		47
5.1	Angka Melek Huruf.....	50
5.2	Rata-rata Lama Sekolah.....	53
5.3	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	55
LAMPIRAN		59

<https://wonosobokab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Biaya Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2023 (000 Rupiah)	26
Tabel 4.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah dan Tipe Daerah di Kabupaten Wonosobo, 2023	33
Tabel 4.2 Persentase Penduduk usia 5 Tahun Ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2023	35
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2023	36
Tabel 4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Tipe daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2023	39
Tabel 5.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Di Kabupaten Wonosobo, 2023	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Persentase Penduduk yang Masih Bersekolah Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah di Kabupaten Wonosobo, 2022-2023	24
Gambar 4.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah di Kabupaten Wonosobo, 2023	31
Gambar 4.2 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2023	32
Gambar 4.3 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023	38
Gambar 4.4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023	41
Gambar 4.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2023	42
Gambar 4.6 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023	44
Gambar 4.7 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2023	44
Gambar 5.1 Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin, 2021-2023	52
Gambar 5.2 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, 2019 – 2023	54
Gambar 5.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wonosobo, 2023	55
Gambar 5.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wonosobo, 2023	56
Gambar 5.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wonosobo, 2023	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sampling Error Persentase Penduduk yang Masih Bersekolah Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Wonosobo, 2023	61
Lampiran 2	Sampling Error Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2023	62
Lampiran 3	Sampling Error Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2023	63
Lampiran 4	Sampling Error Persentase Penduduk usia 5 Tahun Ke Atas menurut Partisipasi Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2023	64
Lampiran 5	Sampling Error Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2023	65
Lampiran 6	Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2023	66
Lampiran 7	Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2023	67
Lampiran 8	Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2023	68
Lampiran 9	Sampling Error Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2023	69
Lampiran 10	Sampling Error Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wonosobo, 2023	70

PENDAHULUAN

BAB 1

Memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Wonosobo pada tingkat kabupaten yang meliputi sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi sekolah, dan hasil pembangunan pendidikan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Begitu pentingnya pendidikan dalam perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menuangkannya dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV“... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...”

Selain memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan juga menetasakan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, serta dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Kegagalan dalam membangun pendidikan akan memicu berbagai problem krusial, seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Permasalahan pendidikan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini antara lain kurangnya pemerataan pendidikan, kurangnya kualitas pendidikan, kurangnya relevansi pendidikan, dan kurangnya efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam dunia pendidikan, pemerintah pun mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju.

Dalam mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, Negara menyelenggarakan program wajib belajar untuk pendidikan dasar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Salah satu langkah pemerintah untuk mensinergikan program-program pendidikan agar tepat sasaran antara lain dengan adanya program Pendidikan Untuk Semua (PUS). Sasaran program Pendidikan Untuk Semua antara lain adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pemberantasan Buta Huruf, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Untuk mengukur dan menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dibidang pendidikan, saat ini, tidak hanya pemerintah di level pusat saja tetapi juga pemerintah daerah sudah semakin membutuhkan data yang terkait dengan pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, angka melek huruf. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan. Konsekuensi dari globalisasi teknologi informasi yang semakin terbuka dan serba cepat adalah semakin tingginya tuntutan terhadap kualitas data. Untuk itu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo telah melakukan upaya untuk dapat menyajikan data yang semakin akurat dan aktual.

1.2 Tujuan

Maksud dan tujuan utama penyajian publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wonosobo adalah untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten

Wonosobo pada tingkat kabupaten. Kondisi dan perkembangan pendidikan dalam publikasi ini akan dilihat dari tiga aspek, yaitu : sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi sekolah, dan hasil pembangunan pendidikan.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi dunia pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan. Dalam jangka pendek, informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat pula digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan target yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1.3 Sistematika Penyajian

Bagian awal publikasi ini menyajikan abstraksi/gambaran umum untuk memberikan gambaran ringkas dan menyeluruh kepada pembaca atas keseluruhan kandungan publikasi. Pembahasan utama dirinci ke dalam lima bab sesuai tema statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penyajian.

Bab 2 menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang mencakup sumber data, keterwakilan sampel, konsep dan definisi, keterbatasan data, serta metode analisis.

Bab 3 menyajikan pembahasan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup informasi umum tentang penggunaan internet, biaya pendidikan dan beasiswa/bantuan pendidikan.

Bab 4 tentang partisipasi pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, partisipasi sekolah, serta pendidikan kesetaraan.

Bab 5 membahas tentang hasil-hasil pembangunan pendidikan yang antara lain dicerminkan oleh angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan putus sekolah.

<https://wonosobokab.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2023. Jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data Kor Susenas Tahun 2023, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai pendidikan seperti sarana prasarana pendidikan, partisipasi pendidikan, dan hasil pembangunan pendidikan.
- b. Data Konsumsi Pengeluaran Tahun 2023, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai konsumsi rumah tangga terkait dengan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial dan ekonomi yang cakupannya relatif sangat luas. BPS melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Konsumsi dan Pengeluaran, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Pada tahun 2011 terjadi perubahan, pengumpulan data konsumsi dan pengeluaran dilakukan secara triwulanan (triwulan I-IV) yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember bersamaan dengan Kor. Susenas Triwulanan dilaksanakan pada tahun 2011-2014. Mulai tahun 2015, pelaksanaan Susenas dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, yaitu bulan Maret dan September. Pada tahun 2023 Susenas dilaksanakan 1 (satu) kali setahun, yaitu pada bulan Maret.

2.2 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas Maret 2023 mencakup 870 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Pencacahan Susenas 2023 dengan jumlah sampel besar menghasilkan estimasi sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

2.3 Kerangka Sampel

Master *sampling frame* yang digunakan dalam pelaksanaan Susenas 2023 sebanyak 40 persen blok sensus dari populasi, yang diambil secara *probability proportional to size* (PPS) dengan ukuran jumlah keluarga hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik Sensus Penduduk (SP) 2020. Pembentukan kerangka sampel Susenas dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah:
 - a. Daftar populasi blok sensus biasa 2020 yang dilengkapi informasi klasifikasi perkotaan/perdesaan.
 - b. Daftar 40% blok sensus 2020 yang terpilih sebagai Master *Sampling Frame*.
 - c. Daftar blok sensus terpilih Susenas Maret 2022.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar populasi rumah tangga yang dilengkapi informasi tingkat pendidikan kepala rumah tangga hasil pemutakhiran Susenas Maret 2023 di setiap blok sensus terpilih.

2.4 Prosedur Penarikan Sampel

Desain yang diterapkan pada Susenas 2023 adalah *stratified two stage sampling* dengan tahapan pemilihan sampel sebagai berikut:

Tahap 1:

- a. Memilih 40 persen blok sensus secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan size jumlah keluarga hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik SP2020 di setiap strata di kabupaten/kota.
- b. Memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara *systematic sampling* di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota untuk Susenas Maret 2022.
- c. Menggunakan blok sensus terpilih Susenas Maret 2022 sebagai target sampel pada Susenas Maret 2023.

Tahap 2:

- a. Rumah tangga yang menjadi sampel utama Susenas Maret 2023 sama dengan sampel rumah tangga Susenas Maret 2022, 10 sampel rumah tangga per blok sensus dipilih secara *systematic sampling* dengan *implicit* strata pendidikan kepala rumah tangga.
- b. Jika hasil pemutakhiran Susenas Maret 2023, rumah tangga yang memungkinkan dijadikan sampel utama kurang dari 10 maka penarikan sampel rumah tangga tambahan dilakukan secara *systematic random sampling* dengan *implicit stratification* pendidikan kepala rumah tangga.

2.5 Design Sampling

Berdasarkan tahapan pemilihan sampel, *sampling scheme* dapat disajikan sebagai berikut:

Tahap	Unit	Jumlah unit strata h		Metode pemilihan sampel	Peluang	Fraksi sampling	Keterangan
		Populasi	Sampel				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Blok Sensus	N_{gh}	n_{gh}	PPS, size M_{ghi}	$\frac{M_{ghi}}{M_{gh}}$	$n_{gh} \frac{M_{ghi}}{M_{gh}}$	Pembentukan Master Sampling Frame blok sensus
		n_{gh}	n'_{gh}	Systematic	$\frac{1}{n_{gh}}$	$\frac{n'_{gh}}{n_{gh}}$	Pemilihan sampel blok sensus
2	Rumah tangga	M_{ghi}^{up}	\bar{m}	Systematic	$\frac{1}{M_{ghi}^{up}}$	$\frac{\bar{m}}{M_{ghi}^{up}}$	Pemilihan sampel rumah tangga

Keterangan:

N_{gh} = jumlah populasi blok sensus di strata ke- h kabupaten/kota ke- g

n_{gh} = jumlah blok sensus yang digunakan sebagai Master Sampling Frame di strata ke- h kabupaten/kota ke- g (untuk daerah perkotaan, untuk daerah perdesaan)

n'_{gh} = jumlah sampel blok sensus Susenas Maret di strata ke- h kabupaten/kota ke- g

M_{ghi} = jumlah populasi keluarga pada blok sensus ke- i strata ke- h kabupaten/kota ke- g pada master frame

M_{gh} = jumlah populasi keluarga pada strata ke- h kabupaten/kota ke- g pada master frame

M_{ghi}^{up} = jumlah muatan rumah tangga hasil pemutakhiran di blok sensus ke- i strata ke- h kabupaten/kota ke- g

\bar{m} = jumlah sampel rumah tangga di setiap blok sensus

2.6 Sampling Weight

Sampling scheme yang telah dijelaskan sebelumnya berguna untuk membentuk *design weight*. *Weight* digunakan karena adanya perbedaan peluang saat pengambilan sampel dan untuk memperoleh estimasi populasi yang valid. Adapun tahapan yang dilakukan dalam menyusun penimbang adalah sebagai berikut:

1. Membangun *design weight* berdasarkan *sampling scheme*. *Design weight* merupakan *invers* dari *overall sampling fraction*. Formulasi dan besarnya *design weight* tergantung dari desain *sampling* yang digunakan. Total dari *design weight* adalah estimasi yang *unbiased* dari total populasi.

2. *Nonresponse adjustment*

Dalam pendataan survei dimungkinkan terjadinya *nonresponse* dan *noncoverage*. Jika estimasi dilakukan dengan menggunakan data yang terdapat *nonresponse* maupun *noncoverage*, hasil estimasi akan bias terhadap populasi. Untuk meminimalkan efek *nonresponse* maupun *noncoverage* terhadap bias estimasi dilakukan *adjustment* terhadap *design weight*.

Nonresponse adjustment digunakan untuk melakukan koreksi nilai *design weight* berdasarkan realisasi pencacahan pada level blok sensus dan rumah tangga sehingga total *nonresponse adjusted weight* akan sama dengan total *design weight*.

3. *Adjustment for household noncoverage*

Adjustment ini bertujuan untuk melakukan kontrol estimasi jumlah rumah tangga yang didasarkan pada proyeksi rumah tangga.

4. *Secondary data control*

Secondary data control merupakan tahapan dari *adjustment noncoverage* rumah tangga dengan menggunakan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dari data proyeksi penduduk. Pada tahapan ini, metode yang digunakan dalam Susenas adalah *Generalized Least Square* (GLS) sehingga akan

dihasilkan suatu *sampling weight* yang unik pada setiap rumah tangga sampel dan dapat digunakan baik untuk estimasi karakteristik rumah tangga maupun karakteristik individu.

5. *Calibration* dari data proyeksi

Total jumlah penduduk dari proyeksi digunakan sebagai dasar *calibration* dalam proses penghitungan *sampling weight*.

6. *Trimmed weight*

Proses *trimming* bertujuan untuk mereduksi variasi *sampling weight* dengan tetap mengacu kepada total *weight* sebagai kontrol nilai total estimasi.

2.7 Estimator

Angka estimasi yang dihasilkan dari data Susenas 2023 dihitung dengan menggunakan penimbang *sampling* (*sampling weight*) final yang sudah dilakukan berbagai *adjustment*. Misal y_{ghij} dan x_{ghij} menyatakan nilai karakteristik Y dan X untuk rumah tangga ke-j, blok sensus ke-i, strata ke-h, kabupaten/kota ke-g, maka estimasi total nilai karakteristik Y dan X, serta estimasi rasio sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \sum_{ghij} W_{ghij}^{(adj)} y_{ghij} \quad \hat{X} = \sum_{ghij} W_{ghij}^{(adj)} x_{ghij} \quad \hat{R} = \frac{\hat{Y}}{\hat{X}}$$

Karena Susenas menerapkan *complex sampling design*, estimasi *standard error* dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti *Taylor Linearization*, *Bootstrap*, *Jackknife*, *Replication*, *Technique*, *Balanced Repeated Replication*, dsb. Penghitungan estimasi dan analisis lebih lanjut harus memperhatikan desain sampling yang diterapkan pada Susenas.

2.8 Konsep dan Definisi

- a) **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk

perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel, yaitu kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

b) **Blok Sensus** adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS.

c) **Rumah Tangga Biasa dan Rumah Tangga Khusus**

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) berjumlah 10 orang atau lebih.

d) **Kepala Rumah Tangga (KRT) dan Anggota Rumah Tangga (ART)**

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih, atau kurang dari satu tahun namun berniat untuk menetap.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 1 tahun atau lebih, atau kurang dari satu tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama satu tahun atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah satu tahun atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang didata atau yang telah tinggal kurang dari satu tahun tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang didata tersebut.

- e) **Biaya pendidikan** adalah semua biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan (berupa uang atau barang) untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan responden.
- f) **Bantuan Pendidikan** adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang bukan karena prestasi, baik berupa uang atau barang, seperti: Beasiswa Miskin, Bantuan Pendidikan dari PNPM (buku, sepatu, uang transport), beasiswa yang diperoleh karena tugas belajar dan sekolah ikatan dinas. Sumber beasiswa/bantuan pendidikan bisa berasal dari BSM (Bantuan Siswa Miskin; bantuan/beasiswa pemerintah lainnya; lembaga non pemerintah; sekolah maupun perorangan).
- g) **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Paket A/B/C).
Pendidikan formal maupun non formal yang dimaksud disini adalah yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya.
- h) **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

- i) **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C), baik yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

j) **Partisipasi Pendidikan**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang Pendidikan tersebut.

- k) **Angka Melek Huruf** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, atau huruf Lainnya.

- l) **Tamat sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

- m) **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
- SD/MI** meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
- SMP/MTs** meliputi jenjang Pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.
- SM/MA** meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat.
- Perguruan Tinggi (PT)** meliputi jenjang pendidikan pada Perguruan Tinggi baik Diploma I/II/III, DIV/S1, S2, S3 dan sederajat.
- n) **Mengakses internet** adalah apabila seseorang meluangkan waktu untuk mengakses internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet seperti: mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail/chatting, dll.

2.9 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif satu atau dua sektor dengan penyajian data dalam bentuk tabel, ulasan sederhana dan visualiasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah kabupaten/kota. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai perkembangan pendidikan selama beberapa periode waktu. Pada akhir publikasi ini dilengkapi pula dengan tabel lampiran untuk melihat data pada tingkat kabupaten/kota.

2.10 Estimasi Sampling Error

Estimasi dari sampel survei dipengaruhi oleh dua jenis *error* (kesalahan) yaitu *sampling error* dan *non-sampling error* (seperti kesalahan dalam wawancara

dan kesalahan pengolahan). *Sampling error* adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik sampling dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* secara teori statistik ditunjukkan oleh besarnya angka standard error dari suatu angka estimasi persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas 2023.

Untuk mengukur presisi dari suatu angka estimasi digunakan besarnya *relative standard error*, yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%). Dengan menggunakan selang kepercayaan 95 persen, dapat disajikan estimasi interval (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error*.

<https://wonosobokab.bps.go.id>

SARANA PENUNJANG PENDIDIKAN

BAB 3



Penduduk yang masih sekolah usia 10 tahun ke atas di daerah perdesaan **lebih banyak** mengakses internet selama tiga bulan terakhir dibanding daerah perkotaan

Pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berasal dari biaya pendidikan adalah sebesar **25.600 Rupiah**



BAB 3

SARANA PENUNJANG PENDIDIKAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan penunjang pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mutu pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata. Sarana prasarana merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung.

Di era digital saat ini, internet merupakan salah satu sarana pendidikan yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Internet dapat digunakan sebagai sumber informasi yang sangat besar dalam dunia pendidikan.

Gambaran faktor internal rumah tangga dalam upaya memperoleh pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara akan dibahas pada bab ini, dimulai dari kemudahan penduduk dalam mengakses pendidikan baik dari aspek penggunaan internet, biaya pendidikan, maupun bantuan pendidikan yang diterima rumah tangga.

3.1 Penggunaan Internet

Sebelum adanya internet, salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan (di semua negara) adalah akses kepada sumber informasi. Dengan adanya internet, kita bisa mengakses informasi sebanyak- banyaknya, baik informasi berupa artikel, gambar, ataupun video.

Di era modern saat ini, internet sudah menjadi salah satu media yang sangat penting bagi setiap orang dalam memperluas wawasan yang dimilikinya. Manfaat internet sekarang sudah dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Internet sebagai salah satu media terbesar di dunia bisa digunakan sebagai pendorong majunya

pendidikan masa depan. Kehadiran internet bukanlah pengganti sistem pendidikan melainkan lebih bersifat penambah dan pelengkap.

Selain memberikan manfaat, internet juga dapat memberikan dampak yang buruk. Hal ini dikarenakan internet tidak hanya menyajikan informasi-informasi positif saja, namun juga informasi-informasi yang bersifat negatif. Oleh karena itu, penggunaan internet pada penduduk usia sekolah sebaiknya mendapat pengawasan dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya.

Gambar 3.1 Persentase Penduduk yang Masih Bersekolah Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah di Kabupaten Wonosobo, 2022-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 3.1 menunjukkan informasi tentang persentase siswa usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir berdasarkan hasil Susenas 2023. Menurut tipe daerah, persentase siswa usia 10 tahun ke atas di perkotaan lebih sedikit yang mengakses internet (90,62 persen) daripada di perdesaan (92,77 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mengakses internet juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana teknologi yang memberikan kemudahan dalam mengakses internet, misalnya tersedianya warnet, wifi gratis, dan lain-lain.

3.2 Biaya Pendidikan

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya pendidikan yang dicakup dalam Susenas merupakan keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh penduduk yang masih bersekolah untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi:

- (i) biaya pendaftaran, yaitu uang pangkal/gedung/daftar ulang;
- (ii) biaya operasional, terdiri atas uang SPP, komite sekolah, praktikum/keterampilan, iuran OSIS, evaluasi/ujian, bahan penunjang mata pelajaran, seragam sekolah dan olah raga, buku pelajaran/panduan/diktat, lembar kerja siswa, alat tulis dan perlengkapannya, kursus yang diselenggarakan sekolah, dan atau biaya rutin operasional pendidikan lainnya;
- (iii) biaya transportasi dan uang saku.

Tabel 3.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Biaya Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2023 (000 Rupiah)

Biaya Pendidikan	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan +Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumbangan Pembangunan Sekolah	2,09	4,23	3,58
Uang Sekolah (SPP/UKT) dan iuran komite sekolah/POMG	19,14	14,80	16,13
Iuran Sekolah lainnya	2,08	1,12	1,41
Buku Pelajaran, <i>fotocopy</i> bahan pelajaran	1,83	1,63	1,69
Alat-alat Tulis	1,50	1,42	1,45
Uang Kursus	1,58	1,24	1,34
Total	28,23	24,44	25,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dirinci menurut jenis pengeluaran pendidikan, terlihat bahwa pengeluaran pendidikan terbesar berasal dari jenis pengeluaran uang sekolah (SPP/UKT) dan iuran komite sekolah/POMG. Biaya pendidikan per kapita untuk jenis pengeluaran ini di daerah perkotaan sebesar Rp19.140,- dan di daerah perdesaan Rp14.800,-. Sementara total pengeluaran untuk uang sekolah (SPP/UKT) dan iuran komite sekolah/POMG sebesar Rp16.130,- per kapita per bulan.

Jenis pengeluaran lain yang cukup besar adalah untuk sumbangan pembangunan sekolah, dimana untuk daerah perkotaan sebesar Rp2.090,-, untuk daerah perdesaan sebesar Rp4.230,- dan untuk daerah perkotaan dan perdesaan sebesar Rp3.580,- per kapita per bulan.

BAB 4

PARTISIPASI PENDIDIKAN

Pada bulan April 2000, 164 negara termasuk Indonesia, bersama lembaga-lembaga internasional lainnya mengembangkan kerangka yang memfokuskan untuk mencapai 6 tujuan pendidikan untuk semua. Tujuan tersebut adalah untuk mencapai perawatan dan pendidikan anak usia dini, mencapai pendidikan dasar untuk masyarakat, perluasan kesempatan belajar bagi remaja dan orang dewasa, penyebaran keaksaraan, tujuan paritas dan kesetaraan gender, serta peningkatan kualitas pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Keberhasilan pendidikan pada tingkat dasar akan meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat menengah, dan memperkuat daya saing untuk meningkatkan kualitas hidupnya ketika dewasa.

Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2023 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

4.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang Pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, yaitu: perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009.

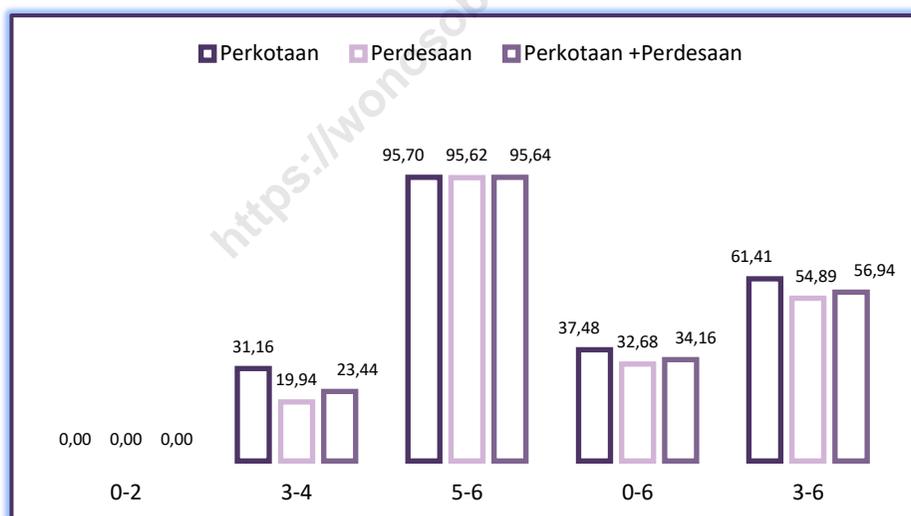
Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

- Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
- Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (masa emas).

Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa partisipasi anak yang mengikuti PAUD pada tahun 2023 usia 3-4 tahun sebesar 23,44 persen, usia 5-6 tahun 95,64 persen, dan usia 3-6 tahun sebesar 56,94 persen. Dilihat menurut tipe daerah, tercatat bahwa partisipasi anak dalam mengikuti PAUD di daerah perkotaan lebih besar daripada daerah perdesaan. Hal ini terjadi pada setiap kelompok umur. Kultur masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dan mobilitas tinggi dalam pekerjaan, turut berperan dalam partisipasi anak mengikuti pendidikan pra sekolah. Selain itu, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan usia dini juga berpengaruh terhadap keputusan untuk mengikutsertakan anak dalam pendidikan pra sekolah.

Gambar 4.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah di Kabupaten Wonosobo, 2023



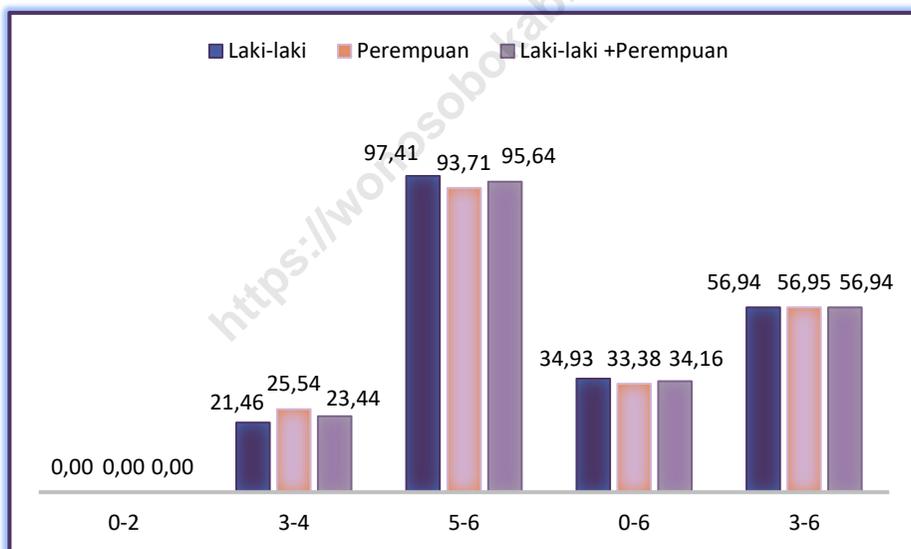
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Persentase anak usia dini yang mengikuti PAUD di daerah perkotaan tercatat sebesar 37,48 persen untuk kelompok umur 0-6 tahun dan 61,41 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun. Sedangkan untuk daerah perdesaan sebesar 32,68 persen untuk kelompok umur 0-6 tahun dan 54,89 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun.

Pada gambar 4.2 memperlihatkan, partisipasi pra sekolah anak laki-laki pada kelompok umur 0-6 tahun (34,93 persen) lebih tinggi daripada perempuan (33,38 persen). Sedangkan pada kelompok umur 3-6 tahun partisipasi anak laki-laki (56,94 persen) lebih rendah dibandingkan anak perempuan (56,95 persen).

Pada kelompok umur 5-6 tahun partisipasi pra sekolah untuk anak laki-laki lebih tinggi (97,41 persen) daripada anak perempuan (93,71 persen). Tapi partisipasi pra sekolah usia 3-4 tahun untuk anak laki-laki lebih rendah (21,46 persen) dibanding anak perempuan (25,54 persen).

Gambar 4.2 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2023 3



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 4.1 di bawah memperlihatkan bahwa persentase tertinggi dari jenis pendidikan PAUD yang diikuti anak usia 0-6 adalah Taman Kanak-Kanak yaitu sebesar 58,95 persen, kemudian PAUD sebesar 25,76 persen, sedangkan yang mengikuti pendidikan pra sekolah di Bustanul Athfal/Raudatul Athfal (BA/RA) sebesar 15,29 persen. Peran TK di pedesaan dalam program pendidikan pra sekolah lebih baik dari

pada di perkotaan. Ketika PAUD/BA/RA kurang terjangkau oleh masyarakat di perdesaan, maka TK Perdesaan yang sejenisnya dapat menyediakan alternatif layanan secara baik. Dari seluruh anak usia 0-6 tahun yang mengikuti Pendidikan pra sekolah di perdesaan, sebanyak 64,39 persen memanfaatkan fasilitas TK, 11,37 persen memanfaatkan fasilitas BA/RA, serta 24,24 persen memanfaatkan fasilitas PAUD, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD BIA, TKQ, dan lain-lain.

Pendidikan anak usia dini melalui jalur informal dapat dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Sebagai upaya pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pemerintah menggulirkan program Bina Keluarga Balita (BKB). BKB merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua dan anggota keluarga lainnya tentang bagaimana melakukan pembinaan tumbuh kembang anak balita secara optimal, serta pemantauannya. BKB juga merupakan wahana bagi orang tua dan anggota keluarganya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan dan pendidikan anak-anaknya.

Tabel 4.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah dan Tipe Daerah di Kabupaten Wonosobo, 2023

Jenis Pendidikan Pra Sekolah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan +Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Taman Kanak-kanak	48,35	64,39	58,95
BA/RA	22,92	11,37	15,29
PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dll	28,73	24,24	25,76
Kelompok Bermain	0,00	0,00	0,00
Taman Penitipan Anak	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

4.2 Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), walaupun usaha peningkatan mutu SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai detik ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk meningkatkan mutu SDM yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengakses pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara

SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 4,60 persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 20,28 persen dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 75,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk usia 5 Tahun Ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2023

Tipe Daerah /Jenis Kelamin	Partisipasi Sekolah			Total
	Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Laki-laki	4,54	21,29	74,17	100,00
Perempuan	5,40	19,79	74,81	100,00
Laki-laki+Perempuan	4,96	20,55	74,49	100,00
Perdesaan				
Laki-laki	3,72	20,94	75,34	100,00
Perempuan	5,18	19,35	75,47	100,00
Laki-laki+Perempuan	4,43	20,16	75,41	100,00
Perkotaan+Perdesaan				
Laki-laki	3,97	21,05	74,98	100,00
Perempuan	5,24	19,49	75,27	100,00
Laki-laki+Perempuan	4,60	20,28	75,12	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah di perkotaan (4,96 persen) lebih tinggi daripada penduduk perkotaan (4,43 persen). Hal ini menunjukkan semakin bagus dan mudahnya akses pendidikan serta semakin lengkap ketersediaan fasilitas pendidikan di perdesaan.

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di daerah perkotaan (20,55 persen) relatif lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (20,16 persen). Sedangkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi di perdesaan (75,41 persen) lebih tinggi daripada perkotaan (74,49 persen).

Faktor demografis lain yang berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan adalah umur. Semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 99,78 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 92,80 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SM/MA) sebesar 65,07 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun (kelompok usia PT) sebesar 12,23 persen.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2023

Tipe Daerah /Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
7-12 th	0,00	100,00	0,00
13-15 th	0,00	95,50	NA
16-18 th	0,00	54,66	45,34
19-24 th	0,00	15,87	84,13
<u>Perdesaan</u>			
7-12 th	0,00	99,69	NA
13-15 th	0,00	91,59	8,41
16-18 th	NA	70,63	28,23
19-24 th	NA	10,75	88,33
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>			
7-12 th	0,00	99,78	NA
13-15 th	0,00	92,80	7,20
16-18 th	NA	65,07	34,19
19-24 th	NA	12,23	87,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

4.3 Angka Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan, misalnya pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. Rumusan Angka Partisipasi sekolah adalah sebagai berikut:

- APS 7-12 tahun:

$$APS_{7-12 \text{ tahun}} = \frac{a1}{b1} \times 100\%$$

a1: jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah

b1: jumlah penduduk usia 7-12 tahun

- APS 13-15 tahun:

$$APS_{13-15 \text{ tahun}} = \frac{a2}{b2} \times 100\%$$

a2: jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah

b2: jumlah penduduk usia 13-15 tahun

- APS 16-18 tahun:

$$APS_{16-18 \text{ tahun}} = \frac{a3}{b3} \times 100\%$$

a3: jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang masih bersekolah

b3: jumlah penduduk usia 16-18 tahun

- APS 19-23 tahun:

$$APS_{19-23 \text{ tahun}} = \frac{a4}{b4} \times 100\%$$

a4: jumlah penduduk usia 19-23 tahun yang masih bersekolah

b4: jumlah penduduk usia 19-23 tahun

Gambar 4.3 memperlihatkan perkembangan APS menurut kelompok umur pada tahun 2021-2023. Secara umum, partisipasi sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada setiap kelompok umur. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2021 sebesar 99,70 persen, meningkat menjadi 99,71 persen pada tahun 2022 dan terus meningkat di 99,78 persen pada tahun 2023. Sementara pada kelompok umur 13-15 tahun mengalami penurunan, APS pada tahun 2021 sebesar 94,13 persen menurun menjadi 94,02 persen pada tahun 2022 dan menurun lagi pada tahun 2023 menjadi 92,80 persen. Fluktuasi APS terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun, dari 59,45 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi 65,18 persen pada tahun 2022 dan menurun menjadi 65,07 persen pada tahun 2023.

Gambar 4.3 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Tipe daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2023

Klasifikasi	Kelompok Umur			
	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	19-23 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Tipe Daerah</u>				
Perkotaan	100,00	95,50	54,66	19,51
Perdesaan	99,69	91,59	70,63	12,59
<u>Jenis Kelamin</u>				
Laki-laki	99,55	91,72	72,25	18,78
Perempuan	100,00	93,95	56,14	9,69
<u>Total</u>	99,78	92,80	65,07	14,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Capaian pendidikan dasar di Kabupaten Wonosobo relatif baik, hampir semua anak usia 7–15 tahun sudah mengenyam pendidikan dasar. Sementara itu, partisipasi sekolah pada kelompok umur pendidikan menengah (16–18 tahun) masih sekitar 65,07 persen. Pada kelompok pendidikan tinggi (19–23 tahun), partisipasi sekolah baru mencapai 14,53 persen.

Secara umum pada tahun 2023, angka partisipasi sekolah perempuan lebih besar daripada laki-laki untuk pendidikan dasar, sementara untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, APS laki-laki lebih besar daripada Perempuan. APS di perkotaan untuk seluruh kelompok umur 7–23 tahun relatif lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Terutama kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, dimana nilai APS pada kelompok umur 19–23 di perkotaan (19,51 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan APS kelompok umur 19–23 di perdesaan (12,59 persen). Hal ini diduga disebabkan oleh tersedianya fasilitas pendidikan tinggi di perkotaan yang jauh lebih baik daripada di daerah perdesaan.

4.4 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Sebagai contoh, APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu bisa mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

Rumusan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah sebagai berikut :

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SM} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK PT} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 19-23 tahun}} \times 100\%$$

Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Perkembangan APK berbeda- beda untuk setiap jenjang pendidikan. Gambar 4.4 memperlihatkan terjadinya fluktuasi APK pada setiap jenjang pendidikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. APK SD/MI cenderung turun sejak tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 APK SD/MI sebesar 107,10 persen, turun menjadi 104,60 pada tahun 2023. Terdapat kecenderungan penduduk ketika memasuki jenjang SD makin sesuai dengan umur

yang direkomendasikan dan semakin sedikit penduduk yang mengulang pada jenjang ini.

Pada jenjang SMP, terdapat kecenderungan nilai APK semakin tinggi. APK SMP pada tahun 2021 tercatat sebesar 90,45 persen dan naik pada tahun 2023 menjadi 99,21 persen. Pada tingkat pendidikan menengah, APK SMA/SMK/MA pada tahun 2021 sebesar 57,43 persen turun menjadi 57,08 persen pada tahun 2022, dan di tahun 2023 naik menjadi 67,37 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tidak banyak penduduk yang berusia di atas atau di bawah 16–18 tahun sedang bersekolah di SMA sederajat.

Gambar 4.4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023



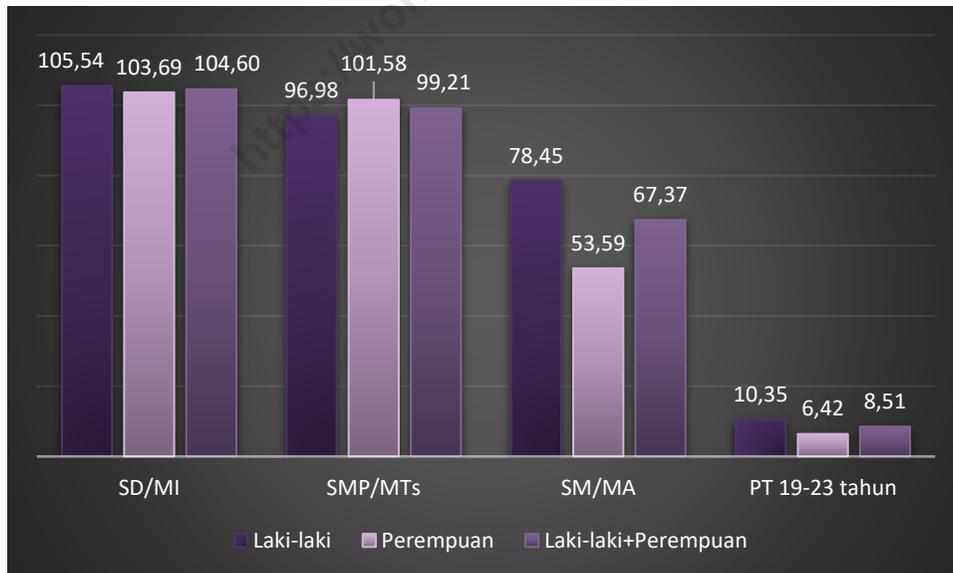
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.5 menyajikan APK menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan pada tahun 2023. Gambar ini juga mencatat bahwa APK untuk SD sebagian besar, baik laki-laki maupun perempuan, nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa murid SD selain mencakup anak yang berusia 7-12 tahun juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan juga lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak anak yang terlambat masuk SD atau

sebaliknya sangat dini (belum cukup umur) untuk bersekolah SD, atau masih ada murid SD yang tinggal kelas.

Pendidikan kesetaraan berkontribusi dalam memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK menurut jenis kelamin relatif tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, APK laki-laki (105,54 persen) lebih besar daripada APK perempuan (103,69 persen). Demikian pula pada jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C, APK laki-laki (78,45 persen) lebih tinggi dari APK perempuan (53,59 persen). Sementara pada jenjang yang lebih tinggi, APK PT 19-23 tahun laki-laki sebesar 10,35 persen lebih besar dari APK perempuan sebesar 6,42 persen. Sedangkan untuk jenjang APK SMP/MTs/Paket B perempuan sebesar 101,58 persen, lebih besar daripada APK laki-laki sebesar 96,98 persen.

Gambar 4.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

4.5 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang Pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Rumusan APM adalah sebagai berikut :

$$\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD sederajat usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SD sederajat usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM SM} = \frac{\text{Jumlah murid SD sederajat usia 16-18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM PT} = \frac{\text{Jumlah murid SD sederajat usia 19-23 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 19-23 tahun}} \times 100\%$$

Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/MI yang berusia 7–12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7–12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia baku yang telah ditetapkan.

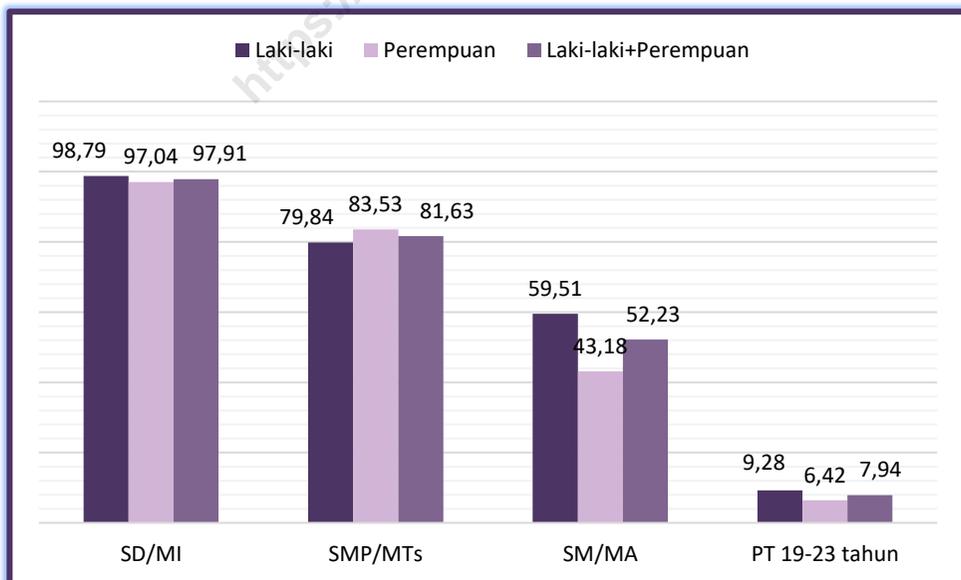
Selama periode tahun 2021 hingga 2023, APM mengalami penurunan di jenjang pendidikan SD, tapi mengalami peningkatan di jenjang pendidikan SMP dan jenjang pendidikan SMA. APM jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2021 sebesar 98,91 persen, menurun menjadi 97,92 persen pada tahun 2022 dan 97,91 persen pada tahun 2023. APM SMP/MTs tahun 2021 sebesar 77,61 persen, meningkat menjadi 77,95 persen pada tahun 2022 dan naik lagi menjadi 81,63 persen di tahun 2023. Adapun pada jenjang SM/MA, APM meningkat dari 45,50 persen pada tahun 2021 menjadi 48,87 persen pada tahun 2022, dan 52,23 persen di tahun 2023.

Gambar 4.6 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.7 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 secara umum nilai APM untuk semua jenjang pendidikan kurang dari 100 persen. APM pendidikan cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

APM pada jenjang SD/MI sebesar 97,91 persen, sedangkan pada jenjang di atasnya jauh lebih rendah. Secara berturut-turut APM SMP/MTs sebesar 81,63 persen, APM SM/MA sebesar 52,23 persen, dan APM PT sebesar 7,94 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan yang signifikan antara APM laki-laki dengan APM perempuan. APM perempuan lebih rendah daripada APM laki-laki, terutama pada jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dan PT. Sementara itu untuk jenjang SMP/MTS/Paket B, APM laki-laki lebih rendah dari perempuan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan gender bukan menjadi masalah dalam pembangunan bidang pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Wonosobo.

Partisipasi sekolah cenderung menurun seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan ataupun semakin tingginya kelompok usia sekolah. Kesenjangan partisipasi yang cukup tinggi sangat terlihat antara jenjang pendidikan dasar/menengah dengan perguruan tinggi. Angka partisipasi pendidikan di perguruan tinggi jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan akses pendidikan penduduk yang masih rendah, masih banyak penduduk yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

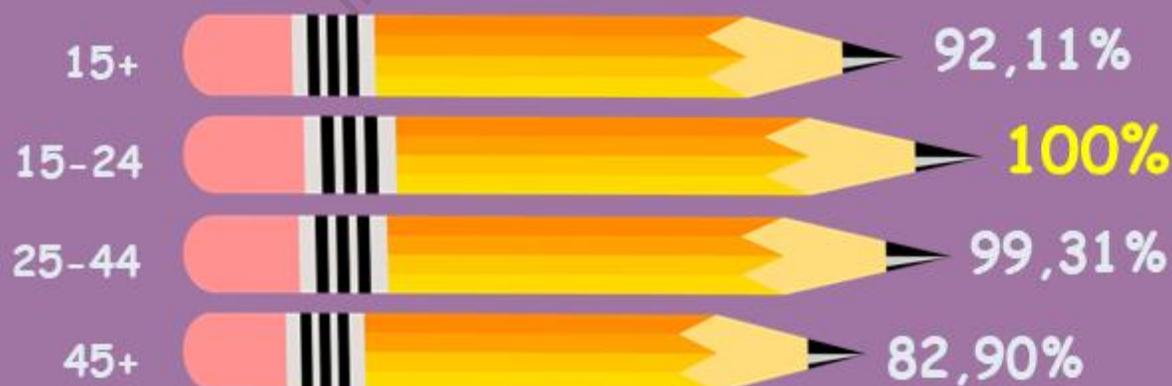
BAB 5



Rata-rata lama sekolah

Tahun 2023, penduduk Kabupaten Wonosobo rata-rata mampu menempuh Pendidikan selama **6,84 tahun** atau telah menamatkan kelas **6 SD**

Angka Melek Huruf, 2023



Seluruh penduduk usia produktif awal (15-24 tahun) telah mampu membaca dan menulis

BAB 5

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa (termasuk di dalamnya pembangunan pada lingkup kabupaten/kota) dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam konteks bangsa Indonesia, landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa “...kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Merujuk kepada petikan pembukaan UUD 1945 tersebut, jelas bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pembangunan sektor pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bisa tergantikan oleh sektor manapun dan sudah menjadi komitmen nasional sejak negara ini berdiri, sehingga isu pendidikan memiliki kedudukan yang strategis untuk selalu dikaji dan dikembangkan.

Hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan alasan tidak/belum pernah sekolah/tidak sekolah lagi.

5.1 Angka Melek Huruf

Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dirumuskan sebagai berikut:

$$AMH = \frac{\text{jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas bisa membaca menulis}}{\text{jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas}} \times 100$$

Angka melek aksara merupakan tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Di dunia internasional salah satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Angka melek huruf merupakan salah satu variabel dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Pemberantasan buta aksara tidak dapat langsung dilaksanakan. Namun memerlukan waktu dan perancangan program yang tepat. Dalam pengembangan masyarakat, program biasanya dikembangkan untuk menyediakan pelayanan sosial yang secara langsung menyentuh sasaran perubahan. Berbagai program yang telah dilaksanakan dalam pemberantasan buta aksara diantaranya adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A, dan program Keaksaraan Fungsional (KF) yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Di Kabupaten Wonosobo, 2023

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	15 tahun ke atas	15-24 tahun	25-44 tahun	45 tahun ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
Laki-laki	96,71	100,00	100,00	92,57
Perempuan	90,77	100,00	99,05	80,37
Laki-laki+Perempuan	93,78	100,00	99,52	86,49
<u>Perdesaan</u>				
Laki-laki	93,76	100,00	99,82	85,97
Perempuan	88,89	100,00	98,60	76,62
Laki-laki+Perempuan	91,37	100,00	99,22	81,31
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>				
Laki-laki	94,66	100,00	99,87	88,00
Perempuan	89,47	100,00	98,74	77,77
Laki-laki+Perempuan	92,11	100,00	99,31	82,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

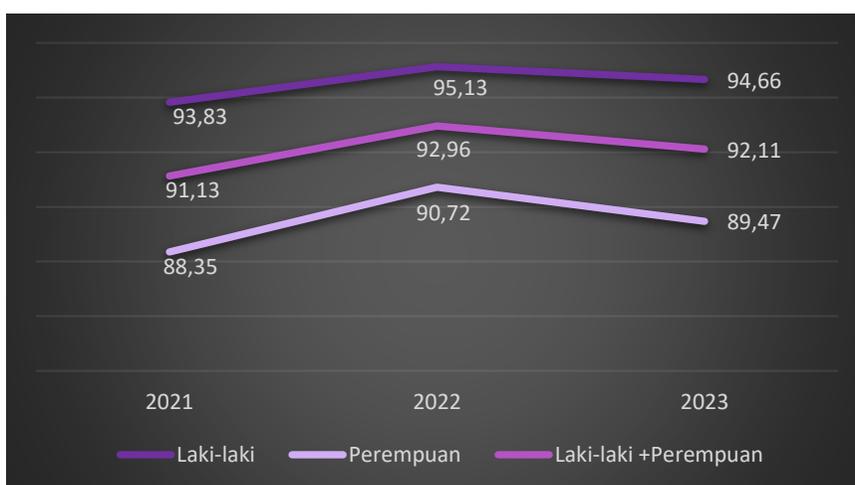
Kondisi keaksaraan di Kabupaten Wonosobo ditunjukkan pada Tabel 5.1 yang menyajikan persentase penduduk melek huruf yang berusia 15 tahun ke atas menurut tipe daerah, jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan hasil Susenas 2023. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase penduduk 15 tahun ke atas yang

melek huruf sebesar 92,11 persen, rendahnya angka melek huruf pada kelompok umur 15 tahun ke atas ini dipengaruhi oleh kelompok umur 45 tahun ke atas. Persentase penduduk 45 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 82,90 persen.

Dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf umur 15 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 91,37 persen, lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan sebesar 93,78 persen. Kondisi yang sama terjadi pada kelompok umur 45 tahun ke atas. Untuk kelompok umur 25-44 tahun daerah perkotaan lebih tinggi dari daerah perdesaan. Sementara itu untuk kelompok umur 15-24 tahun kondisi sama antar daerah perkotaan dan perdesaan yaitu 100,00 persen. Hal ini disebabkan di daerah perkotaan dan perdesaan sudah tersedia fasilitas pendidikan.

Persentase penduduk perempuan melek huruf umur 15 tahun ke atas sebesar 89,47 persen, lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki sebesar 94,66 persen. Kondisi yang sama terjadi pada kelompok umur 45 tahun ke atas. Sedangkan untuk kelompok umur 25-44 tahun daerah perdesaan lebih rendah dari daerah perkotaan. Sementara itu untuk kelompok umur 15-24 tahun kondisi sama antar daerah perkotaan dan perdesaan yaitu 100,00 persen.

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin, 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Salah satu target SDGs pada tahun 2030 menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi (Tujuan 4.6 SDG's). Hasil Susenas 2023 menunjukkan bahwa angka melek huruf umur 15 tahun ke atas mencapai 92,11 persen. Hal ini berarti, kurang dari 10 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa baca tulis. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka melek huruf mengalami penurunan (Gambar 5.1). Penurunan AMH ini terjadi baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan. Dari tahun 2021-2023, AMH laki-laki selalu lebih tinggi dari pada AMH perempuan.

5.2 Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pembentuk indikator IPM ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2023 mencapai 6,84 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP (kelas VII) atau putus sekolah di kelas 1 SMP (Kelas VII).

Gambar 5.2 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, 2019 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Secara umum, rata-rata lama sekolah mengalami kecenderungan naik selama 2019 – 2023. RLS pada tahun 2019 – 2022 selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu 6,76 pada tahun 2019 menjadi 6,81 pada 2020, kemudian 6,82 pada 2021 dan 6,88 pada 2022. Pada tahun 2023, RLS sedikit mengalami penurunan 0,04 poin dibanding 2022 menjadi 6,84. RLS yang cenderung naik selama 5 tahun terakhir mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan semakin naik, walaupun angka tersebut masih jauh dari harapan RLS pemerintah. Jika rata-rata lama sekolah dapat terus ditingkatkan, diharapkan sasaran pembangunan pendidikan dapat tercapai.

5.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara (daerah) karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan.

Gambar 5.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wonosobo, 2023

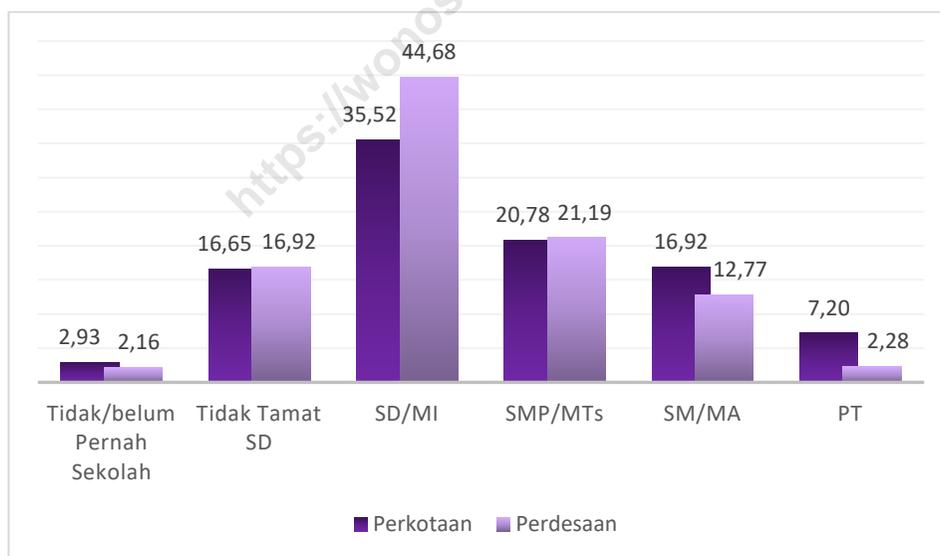


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga selain bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji/upah yang sesuai, tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

Gambaran kualitas SDM Indonesia dilihat dari pendidikan yang ditamatkan disajikan pada Gambar 5.3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas memiliki pendidikan terakhir SD/MI yaitu sebesar 41,87 persen. Selanjutnya sebanyak 21,06 persen pendidikan terakhir yang ditamatkan SMP/MTs dan 14,05 persen SMA/MA. Hanya 3,79 persen saja yang pendidikan terakhir yang ditamatkan hingga perguruan tinggi. Pada 2023, masih ada sebanyak 2,39 persen penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah. Artinya sebanyak 2,35 persen penduduk ini sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal terendah yang tingkat SD sederajat. 2,39 persen penduduk ini bisa jadi generasi lama yang memang belum pernah sekolah sama sekali.

Gambar 5.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wonosobo, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

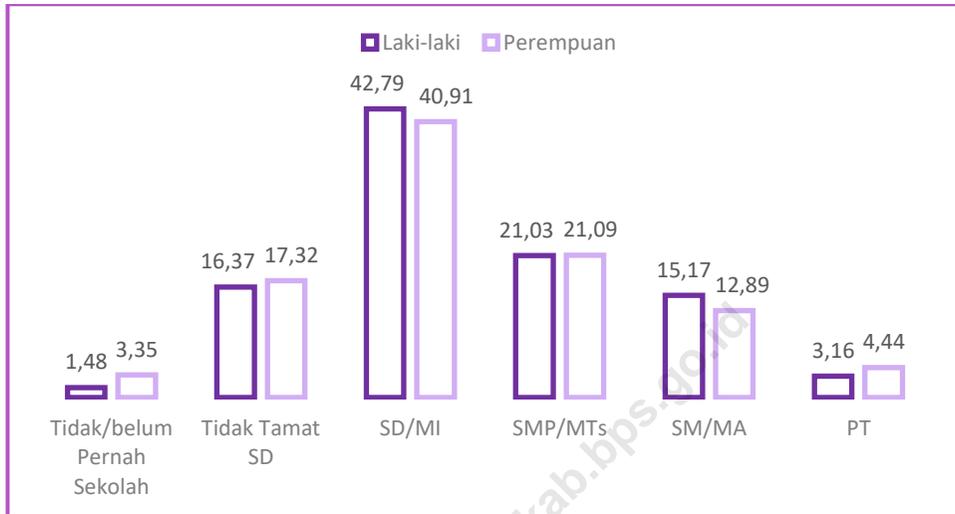
Dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tingkat pendidikan penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan. Persentase penduduk di perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTs ke atas

(SMP/MTs, SM/MA, dan PT) sebesar 44,90 persen, sedangkan perdesaan sebesar 36,24 persen. Sedangkan persentase penduduk yang belum mengenyam pendidikan di perdesaan (2,16 persen) lebih rendah dibandingkan di perkotaan (2,93 persen).

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk laki-laki lebih baik daripada perempuan. Persentase laki-laki yang menamatkan pendidikan dasar, lebih tinggi dibanding perempuan. Sebanyak 39,36 persen penduduk 15 tahun laki-laki menyelesaikan pendidikan setelah SD (SMP/MTs/SM/MA/PT), sedangkan perempuan sedikit lebih rendah yaitu 38,42 persen. Yang menarik, pada jenjang perguruan tinggi, persentase perempuan yang menamatkan pendidikan hingga PT lebih tinggi dibanding laki-laki. Artinya walaupun secara umum persentase laki-laki yang melanjutkan pendidikan setelah pendidikan dasar lebih besar daripada laki-laki, tetapi pada kelompok perempuan kemauan melanjutkan hingga ke jenjang PT lebih tinggi daripada laki-laki.

Selanjutnya masih ada 1,48 persen laki-laki 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah, sedangkan pada kelompok perempuan sebanyak 3,35 persen. Lebih tingginya persentase perempuan yang tidak/belum pernah sekolah dapat saja mengindikasikan bahwa memang jaman dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah.

Gambar 5.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wonosobo, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

LAMPIRAN

<https://wonosobokab.bps.go.id>

Lampiran 1
Sampling Error Persentase Penduduk yang Masih Bersekolah Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Wonosobo, 2023

Kabupaten	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Wonosobo	92,1	1,55	1,68	89,06	95,14

Catatan: ¹jika RSE > 25% tetapi ≤ 50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²jika RSE > 50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Lampiran 2

Sampling Error Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2023

Kelompok Umur	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-2 tahun	-	-	NA	-	-
3-4 tahun	23,44	5,07	21,61	13,50	33,37
5-6 tahun	95,64	2,47	2,58	90,80	100,49
0-6 tahun	34,16	2,95	8,62	28,39	39,93
3-6 tahun	56,94	4,00	7,02	49,10	64,78

Catatan: ¹jika RSE > 25% tetapi ≤ 50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²jika RSE > 50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Lampiran 3
Sampling Error Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2023

Jenis Pendidikan Pra Sekolah	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	58,95	5,52	9,36	48,14	69,77
BA/RA	15,29	4,08	26,69 ¹	7,29	23,28
PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dll	25,76	4,98	19,32	16	35,52
Kelompok Bermain	-	-	NA	-	-
Taman Penitipan Anak	-	-	NA	-	-

Catatan: ¹jika RSE > 25% tetapi ≤ 50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²jika RSE > 50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Lampiran 4
Sampling Error Persentase Penduduk usia 5 Tahun Ke Atas menurut Partisipasi Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2023

Jenis Pendidikan Pra Sekolah	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/belum Pernah Sekolah	4,6	0,46	10,05	3,69	5,5
Masih Sekolah	20,28	0,74	3,66	18,82	21,73
Tidak Bersekolah Lagi	75,12	0,77	1,03	73,61	76,64

Catatan: ¹jika RSE > 25% tetapi ≤ 50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²jika RSE > 50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Lampiran 5
Sampling Error Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2023

Jenis Pendidikan Pra Sekolah	Kelompok Umur	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan	
					Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/belum Pernah Sekolah	7-12 th	-	-	NA	-	-
	13-15 th	-	-	NA	-	-
	16-18 th	NA	0,74	99,89 ²	-0,71	2,19
	19-24 th	NA	0,65	99,73 ²	-0,63	1,94
Masih Sekolah	7-12 th	99,78	0,22	0,22	99,35	100,21
	13-15 th	92,80	2,54	2,74	87,82	97,78
	16-18 th	65,07	5,12	7,87	55,03	75,11
	19-24 th	12,23	2,56	20,94	7,21	17,26
Tidak Bersekolah Lagi	7-12 th	NA	0,22	100,02 ²	-0,21	0,65
	13-15 th	7,20	2,54	35,27 ¹	2,22	12,18
	16-18 th	34,19	5,10	14,92	24,19	44,20
	19-24 th	87,11	2,63	3,01	81,96	92,26

Catatan: ¹jika RSE > 25% tetapi ≤ 50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²jika RSE > 50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Lampiran 6
Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di
Kabupaten Wonosobo, 2023

Kelompok Umur	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7-12 th	99,78	0,22	0,22	99,35	100,00
13-15 th	92,80	2,54	2,74	90,31	100,00
16-18 th	65,07	5,12	7,87	55,03	75,11
19-23 th	14,53	3,00	20,62	8,65	20,40

Catatan: ¹jika RSE > 25% tetapi ≤ 50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²jika RSE > 50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Lampiran 7
Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Wonosobo, 2023

Jenjang Pendidikan	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD/MI	104,60	1,96	1,87	100,76	108,45
SMP/MTs	99,21	5,82	5,87	87,80	110,61
SM/MA	67,37	6,81	10,11	54,03	80,72
PT 19-23 tahun	8,51	2,29	26,84 ¹	4,03	12,99

Catatan: ¹jika RSE > 25% tetapi ≤ 50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²jika RSE > 50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Lampiran 8
Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Wonosobo, 2023

Jenjang Pendidikan	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD/MI	97,91	1,00	1,02	95,95	99,86
SMP/MTs	81,63	3,73	4,57	74,32	88,94
SM/MA	52,23	5,39	10,32	41,67	62,80
PT 19-23 tahun	7,94	2,22	28,01 ¹	3,58	12,30

Catatan: ¹jika RSE > 25% tetapi ≤ 50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²jika RSE > 50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Lampiran 9
Sampling Error Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf
menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2023

Kelompok Umur	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15 tahun ke atas	92,11	0,74	0,81	90,65	93,56
15-24 tahun	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25-44 tahun	99,31	0,32	0,33	98,68	99,95
45 tahun ke atas	82,90	1,50	1,81	79,95	85,85

Catatan: ¹jika RSE > 25% tetapi ≤ 50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²jika RSE > 50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Lampiran 10
Sampling Error Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wonosobo, 2023

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (1)	Estimasi (2)	Standard Error (3)	Relative Standard Error (RSE) (4)	Selang Kepercayaan	
				Batas Bawah (5)	Batas Atas (6)
Tidak/belum Pernah Sekolah	2,39	0,43	17,95	1,55	3,24
Tidak Tamat SD	16,84	1,01	5,99	14,86	18,82
SD/MI	41,87	1,24	2,97	39,44	44,30
SMP/MTs	21,06	1,00	4,77	19,09	23,03
SM/MA	14,05	0,88	6,28	12,32	15,78
PT	3,79	0,56	14,74	2,69	4,88

Catatan: ¹jika RSE > 25% tetapi ≤ 50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²jika RSE > 50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO

Jalan Mayjend. Bambang Sugeng KM 2,2 Wonosobo

Telp. 0286-324270 Fax. 0286-3325380

Email : bps3307@bps.go.id

Website : wonosobokab.bps.go.id